

BAB V

KESIMPULAN

Pidato George Papaconstantinou yang menjabat sebagai menteri keuangan Yunani pada 20 Oktober 2009 dipercaya sebagai awal terjadinya akselerasi terhadap krisis perekonomian yang melanda Yunani. Krisis tersebut kemudian terus berkembang dan mengalami dinamika yang sangat fluktuatif selama kurang lebih enam tahun hingga pertengahan 2015. Krisis perekonomian Yunani berubah menjadi krisis ber skala besar yang menarik perhatian seluruh dunia. Berbagai upaya untuk memperbaiki situasi krisis dilakukan tidak hanya oleh Yunani namun juga oleh Uni Eropa sebagai tempat bernaung Yunani. Namun demikian, meskipun kedua pihak saling membantu, perbedaan kepentingan memicu terjadinya dinamika hubungan antara kedua belah pihak dalam kebijakan yang berkaitan dengan krisis tersebut.

Krisis itu sendiri disebabkan oleh berbagai hal baik dari dalam negeri Yunani atau faktor internal, ataupun dari pihak luar atau faktor eksternal. Dari dalam negeri, pada dasarnya perekonomian Yunani memang bukan lah sebuah perekonomian yang kuat, pertumbuhan ekonomi di Yunani tergolong lambat untuk ukuran sebuah negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi milik Uni Eropa. Pada tahun 2009, menteri keuangan Yunani, George Papaconstantinou, menyatakan bahwa Yunani akan mengalami deficit atau kerugian anggaran sebesar 13% pada akhir tahun. Selain itu, data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Yunani menunjukkan penurunan dari tahun 2010 hingga 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha di Yunani dari sektor privat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik

yang kemudian berdampak kepada perekonomian negara secara keseluruhan. Selain itu, budaya korupsi yang merajalela dan kebiasaan “fakelaki” atau pemberian amplop kecil untuk aparaturnegara yang diberikan oleh rakyat berkaitan dengan urusan administrasi yang kemudian di legalkan oleh pemerintah menimbulkan polemik tersendiri. Korupsi di Yunani telah merugikan negara sebesar 8% dari GDPnya, hal tersebut membuat Yunani menjadi negara terkorup di Eropa menurut hasil dari lembaga survey Uni Eropa.

Selain itu, faktor ketenagakerjaan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi Yunani. Yunani memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2009, sepertiga jumlah perusahaan di Yunani dinyatakan tutup. Hal tersebut menyebabkan berturunnya jumlah lapangan kerja di Yunani. Beberapa sumber survey menyatakan bahwa lebih dari setengah penduduk Yunani yang berusia 25 tahun adalah pengangguran. Situasi tersebut diperparah seiring berjalannya krisis dimana dalam perkembangannya ratusan ribu perusahaan baik lokal maupun multi-nasional gulung tikar.

Kualitas SDM yang rendah juga menjadi pemicu lemahnya perekonomian Yunani. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan krisis, kebijakan-kebijakan penghematan seperti pemotongan hubungan kerja dalam jumlah besar menjadi kendala tersendiri. Pasalnya, jumlah pekerja yang terkena PHK sebagian besar adalah kaum wanita, ironisnya, jumlah wanita dengan pendidikan tinggi lebih banyak daripada jumlah laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama. Sektor ketenagakerjaan Yunani yang semakin melemah berbanding lurus dengan angka GDP yang semakin menurun setiap tahunnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perekonomian Yunani kerap mengalami defisit anggaran. Hal tersebut tidak lepas dari aspek ekspor dan impor sebagai sumber utama pemasukan dan pengeluaran dana belanja rumah tangga Yunani. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-63 di dunia, total nilai ekspor Yunani adalah 33,2 milyar Dollar AS. Namun, Yunani juga tercatat sebagai negara pengimpor terbesar ke-63 di dunia dengan nilai impor sebesar 60,8 milyar Dollar AS. Dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa dari segi ekspor dan impor, Yunani mengalami kerugian karena nilai pemasukannya lebih kecil dari pengeluaran. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menghambat laju perekonomian Yunani hingga mengalami krisis.

Kemudian dari faktor eksternal, penyebab terbesar yang membuat Yunani terjatuh dalam krisis perekonomian adalah jumlah hutang luar negeri yang melonjak jauh lebih tinggi dari PDBnya. Data menunjukkan bahwa nilai hutang Yunani yang tertinggi adalah sebesar 180% dari total PDB yang terjadi pada tahun 2014. Yunani pada dasarnya memang dikenal sebagai negara yang tidak pandai dalam mengelola keuangannya khususnya dari segi hutang luar negeri dimana Yunani memiliki kebiasaan untuk berhutang kepada sektor privat yang memiliki angka suku bunga yang tinggi. Hal yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa dana hutang tersebut tidak digunakan untuk pembangunan yang produktif melainkan untuk dibelanjakan pada aspek-aspek yang bersifat konsumtif seperti anggaran dana untuk sektor publik (gaji pegawai, tunjangan pensiun, dll) dan belanja kebutuhan militer seperti persenjataan dan alutsista.

Kondisi hutang luar negeri Yunani yang tidak stabil tersebut kemudian membuat beberapa perusahaan pemeringkat kredit yang bertugas untuk menilai

hutang luar negeri sebuah negara seperti Standard & Poor's, Fitch, dan Moody's, untuk menurunkan peringkat hutang Yunani bahkan yang terburuk menjadi zona sampah sejak tahun 2014. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Yunani tidak sedang dalam perekonomian yang baik dan bukan tempat yang ideal untuk menanam investasi, bahkan kemungkinan besar diprediksikan akan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya minat para investor asing untuk berinvestasi di Yunani yang kemudian berdampak juga terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya di Yunani.

Di sisi lain, bagi negara-negara yang memiliki perekonomian yang tidak fleksibel seperti Yunani, berada dalam Eurozone memiliki *disadvantage* tersendiri, salah satunya adalah kebijakan Eurozone yang melarang dilakukannya *devaluation* terhadap mata uang Euro. Akibatnya Yunani kehilangan opsi tersebut yang sebenarnya memiliki potensi untuk menggenjot kompetisi ekonomi dan meningkatkan nilai ekspor. Sebagai negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi Uni Eropa, dampak krisis global pada tahun 2009 tidak dapat dihindarkan lagi. Karena efek domino, kondisi negara yang berada dalam sebuah integrasi regional akan berpengaruh terhadap negara lainnya tak terkecuali Yunani.

Yunani sendiri merupakan negara yang tergabung dalam Eurozone pada ekspansi pertama Eurozone yang dilakukan oleh Uni Eropa. Yunani memiliki peran yang cukup sentral dalam Uni Eropa baik itu dari segi perekonomian, birokrasi, maupun keamanan. dari segi wilayah, Yunani memiliki keuntungan karena menjadi titik temu dari jalur perdagangan melalui perairan mediterania. Yunani juga menjadi salah satu basis militer terpenting milik NATO yang menjaga perbatasan terluar Uni

Eropa. Selain itu, Yunani beberapa kali memegang jabatan penting dalam birokrasi Uni Eropa.

Selama masa krisis, aksi dan reaksi terus bermunculan dan membentuk sebuah dinamika yang fluktuatif antara Yunani dan Uni Eropa. Aksi dan reaksi tersebut dimanifestasikan sebagai pertukaran kebijakan antara kedua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Uni Eropa sebagai tempat bernaung Yunani memiliki kewajiban untuk membantu Yunani dalam memperbaiki situasi perekonomian Yunani yang sedang kacau. Mengingat bahwa Uni Eropa menegakkan konsep integrasi regional, maka menyelamatkan Yunani dari kebangkrutan menjadi sebuah kewajiban dalam rangka menyelamatkan perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan.

Sejak awal krisis hingga awal tahun 2015, Uni Eropa telah memberikan bantuan dana berupa *bailout* sebanyak dua kali yakni pada tahun 2010 sebesar 110 milyar Euro dan pada tahun 2014 sebesar 130 milyar Euro. Namun bantuan dana tersebut disertai dengan persyaratan berupa paket penghematan yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah Yunani agar dapat mencairkan dana talangan tersebut. Kebijakan-kebijakan penghematan tersebut berupa pemotongan hubungan kerja, reformasi pajak, dan pemotongan anggaran pensiun. Persyaratan tersebut selalu dipatuhi begitu saja oleh pemimpin-pemimpin Yunani sebelum Alexis Tsipras mulai dari George Papandreou, Lucas Papademos, hingga Antonis Samaras tanpa adanya upaya untuk bernegosiasi dengan pihak Uni Eropa.

Pada masa kepemimpinan Alexis Tsipras, Yunani mulai berani untuk memutar keadaan yang bertujuan untuk meningkatkan martabat Yunani dan

menyelamatkan Yunani tanpa harus ditunggangi oleh kepentingan pihak luar. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Yunani yang sebelumnya, Alexis Tsipras menunjukkan sedikit perlawanan terhadap Uni Eropa. Puncak krisis perekonomian Yunani terjadi pada masa Alexis Tsipras, dimana dikarenakan oleh pembawaan dirinya yang “menentang” Uni Eropa, pihak Uni Eropa berbalik dari yang pada semula memberikan tekanan dari sekedar persyaratan-persyaratan dana talangan, berubah menjadi tekanan-tekanan politik.

Dibawah tekanan Uni Eropa yang menghentikan bantuan dana melalui ECB dan memaksa Yunani untuk segera memenuhi persyaratan *bailout* berikutnya, Alexis Tsipras justru mengadakan referendum untuk menentukan apakah Yunani akan menerima persyaratan dana talangan tersebut atau menolaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Uni Eropa mewacanakan untuk mengeluarkan Yunani dari Eurozone dan Uni Eropa atau *grexit*, namun ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Alexis Tsipras. Dirinya sendiri bahkan menghimbau rakyatnya untuk memilih jawaban “tidak” dalam referendum tersebut. Hasilnya, sebanyak 61% pemungut suara menyatakan menolak persyaratan *bailout* tersebut. Namun pada akhirnya pihak Yunani tetap menerima *bailout* dari Uni Eropa yang ke-tiga sebesar 87 milyar Euro.

Oleh karena itu, referendum yang dilakukan oleh Alexis Tsipras dinilai sebagai sebuah langkah politis belaka. Tujuan dari diadakannya referendum tersebut adalah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpin memiliki satu visi dengan rakyat dan sama-sama menganggap kebijakan penghematan sebagai sebuah beban yang menyengsarakan rakyat, di satu sisi, Alexis Tsipras menyadari seberapa penting peran Yunani bagi Uni Eropa sehingga langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan *bargaining position* Yunani dalam rangka melakukan re-

negosiasi persyaratan *bailout* dengan Uni Eropa. Terbukti dengan adanya pelunakan sikap dari Uni Eropa yang pada semula tegas dengan menyatakan bahwa Uni Eropa hanya memberikan waktu satu minggu bagi Yunani untuk menentukan apakah akan menerima persyaratan *bailout* atau tidak, kemudian memberikan tambahan waktu 72 jam kepada Yunani. Hal tersebut mengindikasikan adanya keraguan Uni Eropa untuk melepas Yunani dari keanggotaannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa strategi Alexis Tsipras berhasil dalam menekan balik Uni Eropa.

Di segi lain, pertanyaan atas mengapa Yunani pada akhirnya tetap menerima *bailout* dari Uni Eropa meskipun pada referendum tersebut menyatakan menolak dapat dijawab bahwa sejatinya, berada dalam Uni Eropa, lebih menguntungkan dari banyak sisi, khususnya berada dalam Eurozone bagi segi perekonomian Yunani dalam jangka panjang. Yunani akan dinyatakan bangkrut apabila gagal dalam membayar hutangnya kepada IMF yang jatuh tempo pada bulan Juni 2015, untuk menghindari hal tersebut, langkah yang paling ideal bagi Yunani adalah menerima *bailout* dari Uni Eropa dikarenakan waktu yang sangat sempit untuk mencari donatur lain. Selain itu, sebagai negara yang banyak bergantung kepada hutang luar negeri, Yunani lebih baik tetap berada di dalam Uni Eropa karena memiliki kebijakan suku bunga yang rendah yakni hanya 1%.

Yunani juga menghindari kemungkinan terburuk yakni keluar dari Eurozone yang apabila terjadi akan sangat berdampak negatif kepada perekonomian Yunani dalam jangka panjang karena artinya Yunani tidak berhak lagi menggunakan Euro sebagai mata uang resmi. Dengan kata lain, Yunani harus mencetak mata uangnya sendiri yakni Drachma, dimana nilai tukar Drachma terhadap mata uang lain dipastikan sangat rendah dalam kondisi krisis tersebut. Selain itu, Yunani dengan

nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai impor, sangat diuntungkan dengan kebijakan integrasi Uni Eropa yang menghilangkan pajak perdagangan antar sesama negara Uni Eropa, karena salah satu partner ekspor dan impor terbesar Yunani adalah Jerman dan Italia yang merupakan negara anggota Uni Eropa.

Dari segi keamanan, Yunani juga lebih aman berada dalam Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan apabila skenario terburuk terjadi, yakni keluar dari keanggotaan Uni Eropa, arah politik luar negeri Yunani lebih condong ke negara-negara komunis seperti Rusia dan China. Maka tidak menghilangkan kemungkinan apabila hal tersebut terjadi, Yunani juga akan kehilangan dukungan dari NATO yang merupakan aliansi militer terbesar bagi Uni Eropa. Diketahui bahwa NATO memiliki hubungan yang tidak kondusif dengan Rusia maupun China. Yunani juga berbatasan langsung dengan Turki, kedua negara tersebut memiliki sejarah gelap dimana keduanya pernah memperebutkan perairan Aegea dan kerap terjadi baku tembak di dekat perbatasannya. Turki yang merupakan anggota terkuat kedua dalam NATO akan memiliki justifikasi untuk melanjutkan konflik apabila Yunani berakhir dengan skenario terburuk tersebut. Hingga pada akhirnya, keputusan Yunani untuk tetap menerima *bailout* dan tetap terdaftar sebagai anggota Uni Eropa lebih menguntungkan bagi Yunani dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian tersebut berfungsi dan telah berhasil membuktikan kebenaran jawaban dari rumusan masalah melalui teori yang dipraktikkan di dalamnya.